
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, KINERJA PENDIDIKAN, PMA, PMDN, DAN KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN IPM DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Stivano Manopo¹, Tri Oldy Rotinsulu², Jacline I. Sumual³
^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi manado 95115, Indonesia
Email : Stivanom3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan mengamati Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai cermin keberhasilan pembangunan pemerintah. Melalui analisis data panel menggunakan *EVIEWS 10*, penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kinerja pendidikan, diukur dengan indikator APK dan APM, menunjukkan hubungan yang berbeda; APK berkorelasi negatif, sementara APM memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Investasi, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, memainkan peran penting dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, konsumsi masyarakat, khususnya dalam makanan, diidentifikasi sebagai indikator kesejahteraan, namun tidak menunjukkan korelasi signifikan. Secara keseluruhan, variabel Pengeluaran Pemerintah, Kinerja Pendidikan, Penanaman Modal, dan Konsumsi Masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor-faktor pembangunan.

Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia; Pengeluaran Pemerintah; Kinerja Pendidikan; Penanaman Modal; Konsumsi Masyarakat

ABSTRACT

This research explores the well-being of the community as a primary focus of Sustainable Development Goals (SDGs), examining the Human Development Index (HDI) as a reflection of government development success. Through panel data analysis using EViews 10, the study indicates that government expenditure has a positive and significant relationship with community well-being. Educational performance, measured by APK and APM indicators, shows different correlations; APK is negatively correlated, while APM has a positive and significant correlation with community well-being. Both Foreign Direct Investment (FDI) and Domestic Direct Investment (DDI) play a crucial role in reducing unemployment and increasing community income. Meanwhile, community consumption, especially in food, is identified as a well-being indicator but does not show a significant correlation. Overall, Government Expenditure, Educational Performance, Investment, and Community Consumption together significantly influence the level of community well-being in the North Sulawesi Province, reflecting the complexity of interactions among development factors.

Keywords: Human Development Index; Government Expenditure; Educational Performance; Investment; Community Consumption

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan, seperti yang disebutkan oleh (Saragih dan Bungaran, 2009). Menurut Todaro (2006), pembangunan juga berupaya meningkatkan standar hidup melalui peningkatan pendapatan, tingkat konsumsi, dan akses pendidikan serta menciptakan kondisi yang mendukung tumbuhnya rasa percaya diri melalui pembentukan sistem sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi selalu mengarah pada tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan konsep Todaro (2003) menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat terwujud melalui pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial serta nilai-nilai seperti kecukupan, jati diri, dan kebebasan. Sen et al., (2011) menjelaskan bahwa indeks kebahagiaan

yang lebih cocok dalam melihat tingkat kesejahteraan, salah satu negara yang menggunakan indikator ini adalah negara Bhutan, bagi negara ini rasa bahagialah yang menjadi tolak ukur kemajuan masyarakat, bukan produksi sebagaimana diukur oleh PDB. Pengukuran keberhasilan ini dapat dilakukan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menggambarkan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Tabel 1 Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara

Tahun	Pengeluaran pemerintah (Rupiah Miliar)	IPM (Persen)
2017	Rp. 1.065,65	72,93
2018	Rp. 1.028,81	72,99
2019	Rp. 1.079,06	72
2020	Rp. 964,2	71,66

Sumber: Data Badan Pusat Statistik & Neraca Pendidikan

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan secara garis besar mengalami penurunan dari tahun 2018 dengan dana sebesar 1.028,81 miliar rupiah pada tahun 2019 sempat mengalami peningkatan sebesar 1.079,06 miliar rupiah dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 964,2 miliar rupiah. Penurunan anggaran pendidikan ini terlihat mengindikasikan mempengaruhi peningkatan angka IPM terlihat dari grafik mulai dari 2018-2020 mengalami penurunan yang mengindikasikan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan ini mempengaruhi kondisi angka IPM.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dikabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara
2. Untuk mengetahui apakah Kinerja Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dikabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara
3. Untuk mengetahui apakah Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dikabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara
4. Untuk mengetahui apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dikabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara
5. Untuk mengetahui apakah Konsumsi Masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dikabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara
6. Untuk mengetahui apakah Pengeluaran Pemerintah, Kinerja Pendidikan, PMA, PMDN, dan Konsumsi Masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dikabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengeluaran Pemerintah

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Guritno, 2001). Adolf Wagner

menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan (Mankiw, 2012).

2.2 Kinerja Pendidikan

Pendidikan merupakan garda terdepan bagi bangsa untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul dalam menghadapi tantangan jaman. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender pada bidang pendidikan. APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya (Safira & Wibowo, 2021).

Menurut Notoatmodjo dan Soekidjo (2003) tingkat pendidikan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu seperti:

- 1) Pendidikan dasar awal selama 9 tahun meliputi SD/ sederajat, SLTP/ sederajat.
- 2) Pendidikan lanjut
 - a) Pendidikan menengah minimal 3 tahun meliputi SMA atau sederajat dan;
 - b) Pendidikan tinggi meliputi diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pendidikan dengan berbagai programnya mempunyai peran penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan professional individu. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan sangat diperlukan oleh setiap orang, karena akan dapat membawa pengaruh yang baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain ataupun masyarakat. Tingkat pendidikan juga akan berpengaruh kuat terhadap peningkatan kesejahteraan hidupnya, karena dengan pendidikan yang memadai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang akan lebih luas dan mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2.3 Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Adapun tujuan dari diselenggarakannya Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara.
- b. Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain.
- c. Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan perusahaan lain.
- d. Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

2.4 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Undang - Undang No. 25 pasal 3 ayat 2 Tahun 2007, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika mengacu pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, maka negara diwajibkan untuk menjamin ketersediaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.

2.5 Konsumsi Rumah Tangga

Menurut Sukirno (2000) bahwa pola pengeluaran seseorang atau rumah tangga pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu konsumsi pangan (makanan) dan konsumsi non pangan (bukan makanan) penggunaan pendapatan untuk konsumsi tersebut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dimana semakin besar pendapatan yang digunakan untuk membeli makanan menunjukkan konsumsi pangan dan non pangan, semakin rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya semakin kecil bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan makanan menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat tersebut.

Menurut Soediyono (2000) yang dimaksud dengan pengeluaran konsumsi disini hanya terbatas pada pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencakup semua pengeluaran rumah-rumah tangga keluarga dan perseorangan serta lembaga-lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004) konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir yang berguna untuk mendapatkan kepuasan maupun memenuhi kebutuhan. Tindakan konsumsi dilakukan setiap harinya, yang tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dengan terpenuhinya berbagai macam kebutuhan, baik dalam kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Tingkat konsumsi memberikan gambaran tingkat kemakmuran seseorang ataupun masyarakat. Maksud dari kemakmuran disini adalah semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang maka semakin makmur, begitu pun sebaliknya semakin rendah tingkat konsumsi seseorang berarti semakin miskin.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Jumita (2021) menyelidiki faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di 13 kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah selama periode 2015-2019. Menggunakan metode analisis linear berganda dengan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)* pada data panel, penelitian ini menganalisis dampak Tingkat Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Infrastruktur, dan Investasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran memiliki dampak negatif dan signifikan secara parsial. Sementara Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Infrastruktur memberikan dampak positif dan signifikan, dan Investasi memberikan dampak positif namun tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Secara keseluruhan, Tingkat Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Infrastruktur, dan Investasi secara bersama-sama memiliki dampak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 13

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama periode tersebut.

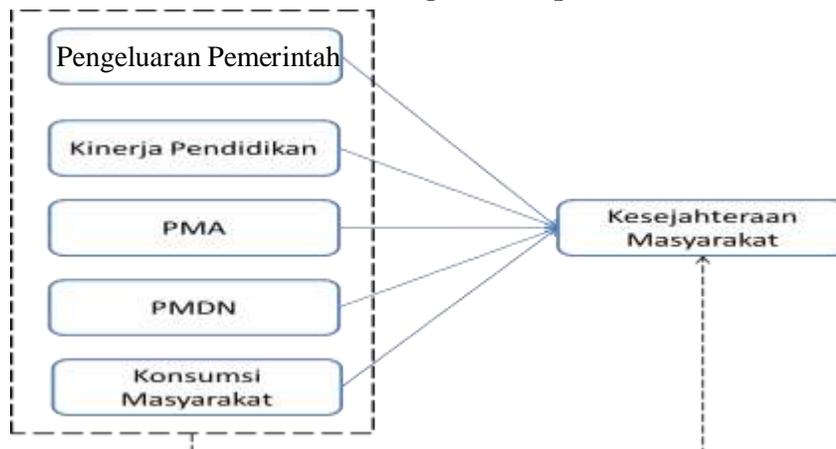
Suprpto et al (2022), tentang *the effect of investment on economic growth and human development index and community welfare (case study in bekasi regency)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori yang menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel dalam menguji hipotesis. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS tahun 2015 hingga 2019 selama 5 tahun, berupa time series di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi..

Loeis dan Setiawina (2020). tentang pengaruh belanja daerah, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Bali periode 2010-2020. Sejak era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi wewenang untuk meningkatkan pendapatan mereka guna menjalankan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh Belanja Daerah, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap kesejahteraan masyarakat, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dari tahun 2010 hingga 2020. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistika dan dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pengaruh variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah dan PMDN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara PMA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM..

2.7 Kerangka Berpikir

Pada gambar berikut digambarkan kerangka konseptual penelitian yang akan diteliti di dalam penelitian ini:

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : diolah penulis

Berdasarkan kerangka pmikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia dikabupaten/kota provinsi Sulawesi utara

2. Diduga Kinerja Pendidikan berpengaruh positif indeks pembangunan manusia dikabupaten/kota provinsi Sulawesi utara
3. Diduga PMA berpengaruh positif indeks pembangunan manusia dikabupaten/kota provinsi Sulawesi utara
4. Diduga PMDN berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia dikabupaten/kota provinsi Sulawesi utara
5. Diduga Konsumsi Masyarakat berpengaruh positif indeks pembangunan manusia dikabupaten/kota provinsi Sulawesi utara

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menjelaskan kedudukan antar variabel dengan menggunakan data sekunder. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah (X1), kinerja pendidikan (X2), penanaman modal asing (X3), penanaman modal dalam negeri (X4), konsumsi masyarakat (X5), dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel (Y).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode dokumentasi lewat website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, National Single Window for Investment, Neraca Pendidikan. Selain itu, sebagai penunjang data penelitian maka dilakukan studi kepustakaan.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan secara materil dan non materil sehingga masyarakat itu dapat hidup dengan layak dan sebagai mana mestinya. Dan indikator yang digunakan dalam pengukuran kesejahteraan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kab/kota di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020
2. Pengeluaran pemerintah (PP) adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, baik oleh pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD, untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang dinyatakan dalam milyaran rupiah.
3. Kinerja pendidikan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setidaknya dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM).
4. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah aliran dana dari perusahaan diluar negeri yang diwujudkan dengan hadirnya investor di negara lain. Data PMA yang digunakan adalah data PMA pada tahun 2017 – 2020. Variabel ini menggunakan satuan juta dollar.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah aliran dana dari pemerintah daerah/pusat yang diwujudkan dengan pengadaan barang publik, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan infrastruktur. Data PMDN yang digunakan adalah data PMDN pada tahun 2017 - 2020. Variabel ini menggunakan satuan Milyar Rupiah.
6. Konsumsi Masyarakat adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir yang berguna untuk mendapatkan kepuasan maupun memenuhi kebutuhan. Indikator yang digunakan dalam mengukur konsumsi masyarakat adalah data konsumsi masyarakat perkotaan/perdesaan bersumber dari Badan pusat statistik.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Regresi Data Panel

Model regresi linear berganda dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model data panel, yaitu penggabungan dari data silang tempat (*cross section*) dan silang waktu (*time*)

series). Keunggulan data panel adalah kemampuan untuk mengontrol heterogenitas individual yang dapat menyebabkan bias pada estimasi Baltagi (2005) dalam buku *Econometric Analysis of Panel Data: Third Edition*. Penelitian ini menggunakan tingkat ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia disesuaikan sebagai variabel independen. Adapun persamaan model regresi dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, \dots)$$

Maka ditentukan persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1(X1)_{i,t} + \beta_2(X2)_{i,t} + \beta_3(X3)_{i,t} + \beta_4(X4)_{i,t} + \beta_5(X5)_{i,t} + \beta_6(X6)_{i,t} + e_{i,t}$$

Dimana:

Y = IPM

α = konstanta

X1= Pengeluaran Pemerintah (PP)

X2 = Angka Partisipasi Kasar (APK)

X3= Angka Partisipasi Murni (APM)

X4 = Penanaman Modal Asing (PMA)

X5 = Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

X6 = Konsumsi Masyarakat (KM)

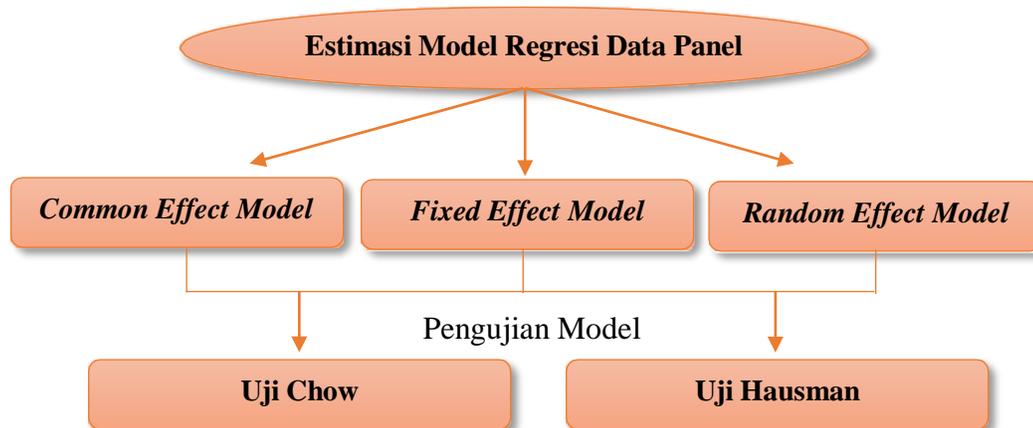
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$ = Koefisien

e = variabel residual

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : diolah penulis

3.5 Uji Signifikansi

3.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat secara individual. Apabila nilai prob t-hitung < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila nilai prob. t-hitung > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya (Widodo, 2019).

3.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan menyeluruh dari variabel bebas dalam menjelaskan keragaman variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai F-hitung terhadap besarnya nilai F-tabel. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka secara statistik variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Widodo, 2019).

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel X yang merupakan variabel bebas menerangkan atau menjelaskan variabel Y yang merupakan variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin baik kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y (Suharyadi dan Purwanto, 2009).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

4.1.1 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Analisis Data Panel memerlukan pemilihan model estimasi terlebih dahulu untuk mendapatkan model terbaik untuk analisis ekonometrika seperti yang telah diuraikan dalam bentuk bagan diatas. Pengujian estimasi model dilakukan dengan dua cara yaitu dengan uji signifikansi yaitu Uji Chow dan Uji Hausman.

4.1.2 Uji Chow

Berdasarkan uji chow yang ditunjukkan pada tabel 4.6 di atas diperoleh nilai signifikansi dari *Cross-section Chi-square* dan *Cross-section F* sebesar 0.0000 dan 0.0000 (kurang dari 0.05), sehingga secara statistik H_0 ditolak, maka model estimasi yang tepat digunakan pada regresi data panel adalah *Fixed Effect Model*

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	99.696056	(14,39)	0.0000
Cross-section Chi-square	216.310837	14	0.0000

Sumber: Data diolah

4.1.1 Uji Hausman

Berdasarkan uji hausman yang ditunjukkan pada tabel 4.7 di atas, diperoleh nilai signifikansi dari *Cross-section* random sebesar 0.0000 (lebih kecil dari 0.05) sehingga secara statistik H_0 ditolak, maka model estimasi yang tepat digunakan pada regresi data panel adalah *Fixed Effect Model*

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	41.375424	6	0.0000

Sumber: Data diolah

4.1.3 Estimasi Model Penelitian

Setelah melakukan uji chow, uji hausman untuk menentukan metode yang paling tepat, maka model yang terpilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Data yang diolah berupa time series dengan kurun waktu 4 tahun yaitu antara tahun 2017-2020 dan data cross section meliputi 11 kabupaten, 4 kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data dengan menggunakan Eviews 10 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Estimasi Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 02/24/23 Time: 09:07
Sample: 2017 2020
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.023328	0.017589	1.326321	0.1924
X1	0.523178	0.104136	5.023998	0.0000
X2	-0.050875	0.025445	-1.999421	0.0526
X3	0.049919	0.021038	2.372792	0.0227
X4	-0.016232	0.005835	-2.781854	0.0083
X5	0.018534	0.024150	0.767441	0.4474
X6	0.009747	0.030426	0.320352	0.7504

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.870677	Mean dependent var	-3.33E-11
Adjusted R-squared	0.855896	S.D. dependent var	1.008439
S.E. of regression	0.119761	Akaike info criterion	-1.137427
Sum squared resid	0.559362	Schwarz criterion	-0.404406
Log likelihood	55.12280	Hannan-Quinn criter.	-0.850702
F-statistic	207.2170	Durbin-Watson stat	1.977027
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil output regresi pada tabel di atas dapat dirumuskan dalam model persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y_{it} = 0.023328 + 0.523178X1_{it} - 0.050875X2_{it} + 0.049919X3_{it} - 0.016232X4_{it} + 0.018534X5_{it} + 0.009747X6_{it} + \varepsilon_{it}$$

4.2 Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini sesuai dengan Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Heka dan Lopian (2017), tentang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi sulawesi utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara

4.2.2. Pengaruh Kinerja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pada penelitian ini, hubungan antara kinerja pendidikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara diukur melalui dua indikator, yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Hasil menunjukkan bahwa APK memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan probabilitas sebesar 0.0526 yang lebih besar dari nilai alpha 0.05. Sementara itu, APM menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut. sesuai dengan Suhardjo dan Drajat (2007) yang mengatakan Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Tingkat pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru. Dengan kata lain pendidikan memiliki pengaruh dalam membantu masyarakat untuk bisa menghadapi tantangan dimasa depan dan mampu memenuhi setiap kebutuhan dasar yang dibutuhkan lewat ilmu pengetahuan yang didapat lewat pendidikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yogiartoro (2019), tentang *Effects of Education Funding in Increasing Human Development Index*. Hasil analisis menunjukkan bahwa angka partisipasi murni (APM) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan nilai probabilitas 0.002 lebih kecil dari 0.05

4.2.3. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penanaman modal asing (PMA) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Loeis dan Setiawina (2020) tentang pengaruh belanja daerah, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Bali periode 2010-2020. Hasil yang didapat menunjukab bahwa PMA memiliki pengaruh hubungan negative dan signifikan terhadap Indeks pembanunan manusia. Penanamana modal asing miliki hasil yang signifikan tetapi mempunyai hubungan negatif yang memberi dampak menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain hasil tersebut menjelaskan bahwa modal asing belum memberi dampak yang baik untuk masyarakat dalam hal perluasan lapangan pekerjaan atau memberikan benefit.

4.2.4. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.4474 lebih besar dari alpa 0.05 persen. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Loeis dan Setiawina (2020) tentang pengaruh belanja daerah, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap indeks pembangunan

manusia di kabupaten/kota provinsi Bali periode 2010-2020. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa PMDN memiliki pengaruh hubungan positif dan tidak signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia.

4.2.5. Pengaruh Konsumsi Masyarakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel konsumsi masyarakat memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.7504 lebih besar dari alfa 0.05 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mankiw (2006) yang menjelaskan bahwa besar kecilnya jumlah konsumsi seseorang tergantung pada besar kecilnya pendapatan, teori konsumsi tersebut memiliki keterkaitan dengan indeks pembangunan manusia, dimana indeks pembangunan manusia dihitung kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan.

4.2.6. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Kinerja Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Konsumsi Masyarakat Secara Bersama-Sama Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah, Kinerja Pendidikan, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Konsumsi Masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini ditunjukkan nilai Prob(F-statistic) 0.000000 lebih kecil dari 0.05 ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah, Kinerja Pendidikan, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Konsumsi Masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

5. PENUTUP

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat selain dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian ini menunjukkan hasil pengeluaran pemerintah dan kinerja pendidikan memiliki peran penting dalam menumbuhkan IPM, tapi tidak kalah pentingnya perlu adanya perbaikan regulasi untuk investasi PMA dan PMDN agar memiliki dampak dalam membuka lapangan pekerjaan yang merata yang nantinya dapat membantu dalam peningkatan IPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alison Jeackline Lawrence Heka, Agnes Lopian, I. L. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Sumatera Utara. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 5(2), 82. <https://doi.org/10.24952/masharif.v5i2.1439>
- Arham, M. A., & Dai, S. I. S. (2019). Analysis of Funding, Education Performance, and Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Economia*, 15(2), 292–305. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i2.26351>
- Baltagi, B. H. (n.d.). *Econometrics Analysis of Panel Data, Third Edition* (W. John & L. Son (eds.)).
- Gregory Mankiw, N. (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro (Principles Of Economis)*. Salemba Empat.
- Jumita, V. F. (2021). *PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN, PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR, DAN INVESTASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI 13 KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2019*.
- Loeis, A. A., & Setiawina, N. D. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Penanaman Modal Asing Dan

Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2010-2020. *E-Jurnal Unud*, 11(02), 495–506.

Mangkoesebroto, & Guritno. (2001). *Ekonomi Publik* (III). BPFE.

Mankiw, G. (2006). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Salemba Empat.

Notoatmodjo, & Soekidjo. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.

Safira, N., & Wibowo, Y. H. (2021). Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni sebagai Indikator Keberhasilan Pendidikan Indonesia. *PAKAR Pendidikan*, 19(2), 101–115.
<https://doi.org/10.24036/pakar.v19i2.212>

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi*. PT Media Global Edukasi.

Saragih, & Bungaran. (2009). Agribisnis sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Millienium Baru. *Studi Pembangunan*, 2(9), 1–9.

Sen, A., Stiglitz, J., & Fitoussi, J.-P. (2011). *Mengukur Kesejahteraan*. PT Wahana Aksi Kritika.

Soediyono. (2000). *Ekonomi Makro; Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*. LIBERTY.

Suhardjo, & Drajat. (2007). *Definisi Tingkat Pendidikan*. PT Refika Aditama.

Sukirno, S. (2000). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.

Suprpto, H. A., Sumaryoto, S., & Saleh, S. (2022). the Effect of Investment on Economic Growth and Human Development Index and Community Welfare (Case Study in Bekasi Regency). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(1), 891.
<https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4705>

Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (8th ed.). Erlangga.

Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Erlangga.

Yogiantoro, M. (2019). Effects Of Education Funding In Increasing Human Development Index. *JEJAK*, 12(2), 482–497.